

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN KULTURAL DAN MODEL PENGENTASAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Putu Ari Mulyani

Program Studi Manajemen , Fakultas Ekonomi,
Universitas Mahendradatta Bali
Jl. Ken Arok No. 12 Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115
arimulyani75@yahoo.com

Abstract

This study aims to determine the main factors leading causes of cultural poverty and developing poverty alleviation model based on local wisdom, such as Hindu based-philosophy Tat

Twam Asi (if I were you) in the community of Kintamani tourist area. The objectives accomplishment of the study were carried out by using the paradigm prototypical studies, combined with reflective analysis method. It was found that the main factors causing poverty in certain parts of Kintamani community were cultural values that lead them difficult to reduce the poverty, such as the cultural habit of begging, laziness, pessimistic, easy to quit, lack of motivation, resigned to fate family situation that been poor hereditary, and low education level. Poverty alleviation model was proposed by elaborating Tat Twam Asi values in the community of Kintamani tourist area through functionalization of social and culture institutions.

Keywords: cultural poverty, social and cultural institutions, and tat twam asi,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab utama timbulnya kemiskinan kultural dan mengembangkan model pengentasan kemiskinan berbasis kearifan lokal, yaitu nilai-nilai agama Hindu *Tat Twam Asi* pada masyarakat kawasan wisata Kintamani. Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian pengembangan tipe *prototypical studies* yang dipadukan dengan metode *analisis reflektif*. Hasil penelitian menemukan, faktor penyebab utama kemiskinan adalah adanya nilai-nilai kultural yang menyebabkan mereka sulit terentaskan dari kemiskinan, seperti kebiasaan meminta-minta atau mengemis, sifat malas, pesimis, mudah menyerah, kurang memiliki motivasi, dan pasrah menerima takdir, keadaan keluarga yang memang dari mulanya sudah miskin secara turun. menurun dan tingkat pendidikan rendah. Model pengentasan kemiskinan dilakukan dengan

mengelaborasi nilai-nilai *Tat Twam Asi* pada masyarakat kawasan wisata Kintamani melalui fungsionalisasi lembaga-lembaga sosial dan budaya lokal.

Kata kunci: kemiskinan kultural, lembaga sosial budaya, dan *tat twam asi*.

Pendahuluan

Kintamani merupakan salah satu tujuan wisata Provinsi Bali, dan objek wisata dunia yang sangat terkenal dengan panorama alamnya, yakni keindahan kaldera dan Gunung Batur. Sebagai kawasan wisata biasanya ditandai dengan “gemerincing dolar”, namun realitanya masih ada sekelompok masyarakat di kawasan wisata Kintamani hidup dalam zona kemiskinan yaitu sebesar 6.80% atau sebesar 6.293 jiwa (Bappeda Kabupaten Bangli, 2011; Data Pendataan Program Perlindungan Sosial/PPLS Provinsi Bali, 2011). *Ironis dan memilukan*, itulah yang pantas dikedepankan atas apa yang terjadi pada masyarakat pedesaan di kawasan wisata Kintamani, Bangli. Di tengah perkembangan industri pariwisata dan gemerincing dolar bagi sebagian kalangan masyarakat Bali pada umumnya, dan Kintamani khususnya, realitanya masih ditemui masyarakat sebagai “pemilik” kawasan wisata Kintamani hidup dalam kemiskinan, seperti tampak pada foto 1. Makna zona kemiskinan di era modern saat ini bisa diartikan bilamana terdapat masyarakat tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya (Lasmawan, 2009a). Pesona indah pegunungan Kintamani yang dinikmati wisatawan melalui paket industri wisata menjadi suatu yang ironis karena hanya sebagian kecil masyarakat pemilik kawasan dapat

menikmati hasilnya. Terdapat 27 desa adat yang mendiami kawasan wisata pegunungan Kintamani, namun yang menikmati imbas dan dampak dari pengembangan industri pariwisata tersebut hanya 5 desa, sementara 22 desa hanya sebatas pendukung dan daerah lintasan pariwisata yang relatif belum merasakan dampak dari pengembangan pariwisata di kawasannya.

Masyarakat di kawasan wisata Kintamani, Bangli sebagai sebuah fenomena sosial, ternyata mewakili sebagian besar fenomena pengembangan kawasan dan tujuan wisata yang saat ini terjadi di Indonesia. Pengembangan industri pariwisata dengan berbagai zona dan infrastruktur pendukungnya, ternyata belum mampu menyentuh aras dasar persoalan kemiskinan masyarakat, seperti yang terjadi di kawasan Tengger dan Lereng Merapi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (Remi, 2002; Sudjarwo dan Basrowi, 2009; Hastuti, 2013). World Bank (2008) membedakan kemiskinan menjadi tiga, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, baik pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan. Sementara kemiskinan relatif (*relative poverty*) adalah suatu tingkat kemiskinan dalam hubungannya dengan suatu rasio garis kemiskinan absolut atau proporsi distribusi pendapatan

(kesejahteraan) yang timpang atau tidak merata. Oscar Lewis menyatakan, kemiskinan kultural muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, yakni malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya. Kemiskinan cultural merupakan efek domino dari belenggu kemiskinan struktural yang menghinggap masyarakat terlalu lama, atau secara tidak langsung menunjukkan adanya keterkaitan antara kemiskinan structural dengan kemiskinan kultural sehingga membuat masyarakat apatis, pasrah, dan berpandangan jika sesuatu yang terjadi adalah takdir (Rahmatullah, 2013). Berangkat dari kategori kemiskinan tersebut, tampaknya kemiskinan yang terjadi pada masyarakat yang tinggal di kawasan wisata Kintamani termasuk kemiskinan kultural. Hal ini disebabkan secara politis dan ekonomis, bahwa pemerintah Kabupaten Bangli telah melakukan beberapa kebijakan, namun realitanya terjadi penolakan keluar dari kemiskinan oleh sekelompok masyarakat dengan alasan budaya atau kebiasaan. Telah terjadi tanda-tanda abrasi nilai-nilai budaya masyarakat lokal, yang memicu konflik horizontal dan vertikal di kalangan masyarakat adat. Pengembangan kawasan wisata Kintamani belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Kondisi ini semakin diperkuat dengan tidak meratanya pembagian “kue” kesejahteraan yang ditimbulkan oleh pengembangan kawasan ini sebagai kawasan kunjungan wisata dunia sehingga semakin memperparah daya beli dan tingkat pendapatan

masyarakatnya. Bahkan, mereka mengalami keterpurukan ekonomi, akibat lahan pertanian mereka yang ditanami jeruk mati diserang CVPD, kemudian dialihkan ke komoditas lain seperti ketela, cabe, dan sayur mayur yang mekanisme pasarnya dilakukan dengan sistem ijon. Hal ini berdampak pada kemampuan beli masyarakat secara ekonomis merata mengalami penurunan drastis, apabila dibandingkan saat kawasan ini masih menjadi lahan pengembangan pertanian jeruk (Lasmawan, 2008; Inten, 2010).

Desa-desa yang terkategori kedalam destinasi wisata Kintamani merupakan desa agraris dengan tipologi lahan kering dan merupakan perbukitan dengan sebagiannya adalah lembahlembah yang sangat cocok untuk pengembangan pertanian sayur mayur dan palawija serta perkebunan (Foto 2). Berbagai kebijakan secara struktur telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, dan pemerintah provinsi Bali, seperti program Gerbangdesigot (gerakan pembangunan desa dengan sistem gotong royong), program GGS (Gerbang Gita Santi), bedah rumah, bantuan langsung tunai (BLT), dan bantuan modal melalui Gerbangsadu (gerakan pembangunan desa terpadu). Namun, realitanya masyarakat miskin di kawasan wisata kecamatan Kintamani belum mampu secara optimal melepaskan diri dari balutan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat data kantor Kesra Camat Kintamani (2016), bahwa data rumah tangga sasaran menerima Raskin masih relatif tinggi yang mencapai angka 4.754 RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran-Penduduk Miskin).

Kemiskinan yang terjadi di kawasan wisata Kintamani, disebabkan karena adanya faktor budaya masyarakat setempat yang kontra produktif dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah secara formal. Kondisi ini diperkuat lagi dengan adanya budaya *idih-idih* (mengemis) di kawasan wisata pegunungan Kintamani, seperti Desa Munti yang berbatasan dengan Desa Soongan dan Desa Trunyan. Budaya *idih-idih* ini disebabkan oleh sifat malas, sifat ketergantungan yang tinggi, adanya ketimpangan pembagian kue industri pariwisata sebagai dampak dari lemahnya posisi tawar dan akses politik ke pemerintah daerah (Lasmawan, 2009a). Fakta ini tentu sangat bertolak belakang dengan apa yang dikenal oleh masyarakat umum, bahwa Kintamani adalah salah satu tujuan wisata di Provinsi Bali yang memiliki keunggulan, seperti panorama kaldera Gunung Batur serta budaya penguburan mayat dengan meletakkan jenazah di bawah pohon, ternyata memiliki tingkat kemiskinan mencapai 6.80% di atas kemiskinan Provinsi Bali 3,95% (Data PPLS Provinsi Bali, 2011).

Karakter masyarakat setempat dengan kebiasaan dan budaya yang telah dianutnya, perlu diperhatikan dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat di kawasan wisata Kintamani berbasiskan kearifan lokal. Sebagai penganut Hindu yang loyal dan budaya yang telah terwariskan secara turun temurun, menyebabkan kebijakan pemerintah daerah setempat “mentok” dan kontra produktif dengan persoalan kemiskinan yang membelit masyarakat setempat. Menurut Lasmawan (2009b), terdapat

beberapa factor penyebab, tidak produktifnya sebuah kebijakan formal di era otonomi, yaitu (1) bertentangan dengan kebiasaan masyarakatsetempat, (2) bertolak belakang dengan budaya yang dianut, (3) tidak berdampak ekonomis langsung, dan (4) arogansi kewilayahan dan/atau kedirian masyarakat.

Fenomena kemiskinan kultural yang terjadi di kawasan wisata Kintamani, perlu dikaji secara mendalam, meliputi faktorfaktor penyebab utama masyarakat kawasan wisata Kintamani, Bangli menjadi miskin, dan mengembangkan model pengentasan masyarakat miskin berbasis kearifan lokal melalui elaborasi nilai-nilai *Tat Twam Asi*, penguatan lembaga-lembaga sosial dan budaya masyarakat dengan bersandar pada keluhuran nilai-nilai agama dan budaya setempat. Pengembangan model ini dipandang sebagai sebuah pendekatan baru bagi masyarakat, karena selama ini pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah lebih dominan berbentuk bantuan yang bersifat materi dan sporadis/insidental, sehingga relatif kurang efektif membawa masyarakat setempat keluar dari zona kemiskinan. Penelitian-penelitian mutakhir yang ada hubungannya dengan penelitian ini, yaitu tentang agrowisata dan pengentasan kemiskininan di kawasan wisata pegunungan Kintamani, antara lain yang dilakukan oleh Suardika (2009); Arganta (2009); Erawan (2010); Inten (2010); serta Lasmawan (2008; 2009a; dan 2009b).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigm penelitian

pengembangan tipe *Prototypical Studies* yang dipadukan dengan metode *Analisis Reflektif* (Akker, 1999; Nieveen, 1999; Plomp, 2007). Analisis dilakukan selama pengumpulan data dengan teknik deskriptif kualitatif. Peneliti sebagai instrumen utama, sehingga diperoleh sebuah inovasi terstruktur terkait dengan model pengentasan masyarakat dari kemiskinan dengan mengelaborasi nilai-nilai *Tat Twam Asi* melalui fungsionalisasi lembaga-lembaga sosial dan budaya lokal. *Tat Twam Asi* adalah ajaran moral dari Agama Hindu, yang identik dengan perikemanusiaan dalam Pancasila. *Tat Twam Asi* mempunyai arti engkau adalah aku dan aku adalah engkau, yang mengandung asas: suka duka, *paras paros, salunglung sabayantaka*, saling asih, saling asah, dan saling asuh. Filosofi yang termuat dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa berempati, merasakan apa yang tengah dirasakan oleh orang miskin yang ada di dekat kita. Pentingnya solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terbentuk kehidupan masyarakat sejahtera (Hendra, 2013).

Lokasi penelitian di Kecamatan Kintamani, Bangli, yang dilaksanakan bulan April 2015. Lokasi ini dipilih, karena memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi (6,80%) atau jumlah penduduk miskin 6.293 orang, padahal daerah tersebut merupakan destinasi wisata alam dunia yang sangat terkenal (Data PPLS Provinsi Bali, 2011). Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipatif, wawancara, penyebaran kuesioner, studi dokumen, dan *focus groups*

discussion (FGD). FGD dilakukan dengan mengundang unsur-unsur dari institusi pemerintah dan lembaga sosial budaya yang berada di lingkungan kecamatan Kintamani dan kabupaten Bangli, seperti dari Bappeda, kantor kecamatan Kintamani, UPT Disdikpora Kecamatan Kintamani, kepala desa, kelian banjar dinas, kantor pemberdayaan masyarakat desa, lembaga karang taruna, desa adat, kelian adat, parisada Hindu Dharma Indonesia kabupaten, tokoh masyarakat, pelaku wisata, dan masyarakat miskin.

Pembahasan

Perda Provinsi Bali No.16/2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali pasal 82, bahwa Kintamani merupakan objek daya tarik wisata khusus (ODTWK) yang terletak di Kabupaten Bangli. Kintamani merupakan salah satu tujuan wisata di Provinsi Bali, yang mengandalkan keindahan kaldera Gunung Batur, danau Batur, air panas dan budaya masyarakat setempat. Salah satu objek wisata yang populer dan menikmati imbas dari pengelolaan industri pariwisata pegunungan Kintamani adalah objek wisata Toya Bungkah, seperti tampak pada foto 3. Kintamani sebagai ODTWK ramai dikunjungi oleh wisatawan yang jumlah kunjungan wisatawan relatif meningkat. Hal ini bisa dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan ke Kintamani lima tahun terakhir (tahun 2010-2014) sebagai tabel berikut.

Tabel 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kintamani tahun 2010-2014

No.	Tahun	Jumlah Wisatawan (orang)	Peningkatan (%)
1	2010	375.789	-
2	2011	495.710	32
3	2012	502.805	1
4	2013	564.451	12
5	2014	566.352	0,34
Rerata		501.021	11

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2015

Pengembangan industri pariwisata di kawasan wisata Kintamani, hanya dinikmati oleh beberapa desa, yakni lima desa yang terkenal dengan istilah “bintang danu”, yaitu Desa Kedisan, Desa Buahon, Desa Songan, Desa Trunyan, dan Desa Batur. Sementara desa lainnya hanya sebatas “pendukung” dan “daerah lintasan pariwisata” yang relatif belum merasakan dampak dari pengembangan pariwisata di kawasannya, seperti Desa Abang Songan. Desa ini memiliki jumlah penduduk 1.251 jiwa dengan luas wilayah 4.250 km², dan jumlah rumah tangga 351 RT. Desa Abang Songan merupakan salah satu desa pendukung kawasan wisata Kintamani, tetapi belum menikmati kontribusi yang layak dari produktivitas pariwisata Kintamani, sehingga jumlah penduduk miskin di desa tersebut relatif tinggi yang mencapai angka 105 RTSPM (Data Kantor Kesra Camat Kintamani, 2016).

Lembaga sosial-budaya yang terdapat di kawasan pariwisata Kintamani, pada umumnya adalah *sekehe* teruna teruni, kelompok tani, gabungan kelompok tani, *sekehe*

joged, *sekehe santi*, *sekeh tabuh*, *sekehe payus*, *sekehe rejang*, *sekehe manyi*, *sekehe baris*, *sekehe pruguh*, *sekehe gong*, *sekehe gambuh*, lembaga perkreditan desa, desa adat, prajuru desa adat, koperasi unit desa, kelompok penyakap, dan kelompok peternak. Semua lembaga sosial budaya tersebut memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang struktur organisasinya pada umumnya mengacu pada pola manajemen sederhana, yaitu ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan anggota.

Untuk kelompok tani, keberadaannya hampir menyerupai organisasi subak. Mengingat wilayah Kintamani merupakan daerah kering dan jarang ada sungai yang berair, maka sebutan subak bagi organisasi petani tersebut jarang digunakan, dan mereka lebih senang menggunakan istilah kelompok tani. Di satu desa, biasanya terdapat lebih dari satu kelompok tani yang anggotanya terdiri atas 20 orang, sehingga kesatuan organisasi ini untuk satuan wilayah desa lebih sering menggunakan istilah gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat desa kawasan agrowisata

pada umumnya dan petani pada khususnya, dapat dilihat dari berbagai aspek khusus, seperti aturan desa dan pengelolaan lembaga sosial dan budaya desa, luas dan kepemilikan lahan, sistem permodalan, pemanfaatan sumber daya, dan sistem penjualan. Sistem penjualan hasil panen dilakukan dengan sistem *pajegang*/borong (sistem ijon) dan petik berkala, sehingga lebih menguntungkan para tengkulak. Hal ini tidak lepas karena ketidakberdayaan petani atau masyarakat dalam melakukan negosiasi harga.

Persoalan yang sangat besar adalah masyarakat setempat kurang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang pariwisata, seperti kemampuan berbahasa asing, inovasi produk lokal dan kemampuan menjual yang disebabkan oleh tingkat pendidikannya yang masih rendah (sekolah dasar). Perhatian pemerintah dan dinas terkait saat ini juga masih sangat minim, dalam melibatkan pedagang acung mengelola dan mengembangkan objek wisata. Ratusan masyarakat lokal berprofesi sebagai pedagang acung, mereka menjual atau menjajagan barang dagangannya, seperti pernak-pernik, patung, baju dan buah-buahan seadanya, seperti tampak pada foto 4. Kintamani merupakan suatu kawasan yang dihuni oleh masyarakat yang secara historis memiliki persamaan nasib dan latar belakang kebudayaan. Mereka terikat dalam suatu tatanan sosial kemasyarakatan yang disebut dengan desa adat. Desa adat dipimpin oleh prajuru desa adat. Kepengurusan desa adat yang dilaksanakan masyarakat Kintamani secara fundamental tidak jauh berbeda

dengan desa-desa adat di daerah lain di Bali. Hal ini disebabkan pengaruh dari kemajuan masyarakat itu sendiri maupun pengaruh dari dunia luar (pariwisata).

Tipe pemerintahan desa adat yang berlaku pada masyarakat Kintamani mengikuti pola *hulu apad* (struktur desa adat) yang didasarkan dari waktu pelaksanaan upacara parebuan (perkawinan). Sistem kepemimpinan desa adat bersifat kembar, dimana pimpinan desa adat dipegang oleh dua orang *jero kubayan*, yaitu *jero kubayan mucuk* dan *jero kubayan nyoman*. Kedua orang pemimpin desa adat ini dibantu oleh *saih nembelas* dalam menjalankan tata kehidupan adat (Lasmawan, 2009b). Secara umum terdapat beberapa faktor yang menstimuli munculnya kemiskinan pada masyarakat yang tinggal di kawasan wisata pegunungan Kintamani, seperti faktor-faktor kondisi alam dan geografis, ketidakadilan ekonomi, sosial ataupun politik yang mereka alami baik pada tatanan pemerintahan formal, maupun pada konstelasi kemasyarakatan lokal.

Pemerintah daerah telah berupaya melakukan beberapa program dan kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan, namun faktanya terjadi kontradiktif dengan budaya atau kebiasaan masyarakat setempat. Kondisi ini semakin diperkuat dengan tidak meratanya pembagian “kue industri wisata” sehingga semakin memperparah daya beli dan tingkat pendapatan masyarakatnya. Berdasarkan analisis data, ternyata faktor-faktor utama yang menyebabkan kemiskinan kultural pada masyarakat di kawasan wisata pegunungan Kintamani adalah nilai-

nilai kultural yang menyebabkan mereka sulit terentaskan dari kemiskinan, seperti kebiasaan meminta-minta atau mengemis, sifat malas, pesimis, mudah menyerah, kurang memiliki motivasi, dan pasrah menerima takdir, keadaan keluarga yang memang dari mulanya sudah miskin secara turun menurun. Faktor-faktor tersebut bersifat ekonomi, seperti keterbatasan sandang, pangan dan papan sebagai akibat dari minimnya tingkat pendapatan masyarakat; faktor sosial, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial; Menurut mitos *I Ratu Ayu Mas Membah*, bahwa budaya *idih-idih* ini terjadi karena adanya kutukan dari *Bhatari Batur* yang bergelar *I Ratu Ayu Mas Membah*. Disebutkan, bahwa beliau menyamar sebagai orang tua yang menjual air ke daerah pegunungan Bali Utara sampai di daerah Munti Gunung Karangasem. Ketika beliau tiba di daerah tersebut, beliau diejek, dan ejekan itu sangat menyinggung perasaannya. Kemudian orang tua itu berkata, “wahai orang Munti Gunung, engkau menghina aku, tidak tahu engkau kalau aku adalah Bhatari Batur, mulai saat ini semoga engkau menjadi peminta-minta dan menjadi cemohan orang lain, serta kehidupanmu serba kekurangan”. Demikian kutukan Bhatari Batur yang merasa tersinggung. Logika mitos ini, bahwa daerah Munti Gunung tidak dikaruniai anugerah Tuhan berupa air yang menjadi titik tolak subur-tidaknya suatu daerah. Kekeringan adalah salah satu faktor pembentuk karakter orang menjadi “keras dan sedikit pemalas”, karena apapun yang dilakukan selalu dihantui oleh

kegagalan hasil yang diperolehnya. Dengan demikian, lebih baik mereka menjadi pengemis daripada berusaha tanpa hasil apa-apa. Mereka mengemis sampai ke perbatasan desa, yakni ke desa Trunyan dan Desa Soongan. Kemalasan cara berpikir dan berbuat ini telah laten dan terus membudaya dari generasi ke generasi sampai sekarang ini. Mitos ini menunjukkan adanya “penguasa air” yang memberikan *anugrah* maupun kutukan pada daerah-daerah tertentu menjadi berair atau kering/tandus. Di sinilah sosio-kultural secara stereotype terbentuk bahkan seakan mendapat legitimasi kosmis (Duija, 2006; Hardiman, 2003). Untuk menanggulangi kemiskinan kultural di daerah tersebut, diupayakan pengembangan model pengentasan kemiskinan kultural berbasis kearifan lokal. Sasaran model program adalah masyarakat miskin kawasan wisata Kintamani dengan memberdayakan atau penguatan lembaga-lembaga sosial-budaya yang dijiwai nilai-nilai *Tat Twam Asi*, seperti desa Adat dan Dinas dengan jajarannya, Bappeda Kabupaten, lembaga karang taruna, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa, tokoh masyarakat, dan kelompok sosial budaya lokal lainnya. Keterlibatan mereka dalam pelaksanaan model disesuaikan dengan tugas, wewenang dan fungsi dari masing-masing institusi/pranata tersebut. Model pengentasannya diformulasikan ke dalam strategi dan sasaran program yang dijiwai oleh nilai-nilai *Tat Twam Asi*. Melalui pemberdayaan atau penguatan lembaga sosial budaya agar lebih

berempati untuk membantu masyarakat miskin sebagai milik bersama, sehingga kemiskinan budaya (malas, pesimis, kurang memiliki motivasi, dan pasrah menerima takdir, lemahnya akses

serta budaya mengemis) dapat tereliminasi. Model pengembangan pengentasan kemiskinan direpresentasikan dalam strategi dan arah kebijakan sebagai table

Tabel 1 Strategi dan Sasaran Program Pengembangan Model Kemiskinan Kultural Berbasis Kearifan Lokal di Kawasan Wisata Pegunungan Kintamani, Bangli

No.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Memenuhi kebutuhan ketahanan pangan keluarga miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani	a. Memberikan bantuan langsung pangan kepada keluarga miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani b. Menjamin kecukupan pangan bagi keluarga miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani c. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin
2	Memenuhi layanan kesehatan keluarga miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani	a. Memberikan layanan kesehatan bagi penduduk miskin kawasan wisata Kintamani di kelas III Rumah Sakit b. Memberikan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani c. Memberikan pelayanan kesehatan penduduk miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani di Puskesmas dan jaringannya d. Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin kawasan wisata Kintamani tentang pencegahan penyakit menular, lingkungan sehat, gizi dan perilaku hidup sehat
3	Memenuhi layanan pendidikan bagi keluarga miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani	a. Meningkatkan partisipasi masyarakat miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani dalam jenjang wajib belajar sembilan tahun b. Menurunkan angka buta aksara pada masyarakat miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani c. Memberikan pelayanan pendidikan non formal bagi masyarakat miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani d. Memberikan kesempatan bagi anak - anak kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan tinggi

Tujuan pengembangan model, adalah merevitalisasi nilai-nilai moral masyarakat lokal menjadi *common values*; membantu pemerintah dalam pengentasan masyarakat miskin kawasan wisata pegunungan Kintamani; meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar sebagai “pemilik wilayah” dalam mengentaskan kemiskinan kawasan wisata Kintamani; percepatan program pengentasan kemiskinan kawasan; meningkatkan produktivitas program-program pengentasan kemiskinan kawasan wisata Kintamani yang bersumber dari pendanaan pemerintah maupun swadaya masyarakat; membentuk dana solidaritas masyarakat untuk penghapusan kemiskinan kawasan wisata Kintamani; mengembangkan program bagi pembangunan berkelanjutan dan pengembangan masyarakat daerah lokal dalam lingkup strategi pengurangan kemiskinan kawasan wisata Kintamani, meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat miskin kawasan wisata Kintamani serta organisasi kelompok masyarakat desa adat; memajukan akses yang sama dan partisipasi penuh kaum perempuan, berdasarkan prinsip kesetaraan dengan pria, dalam pengambilan keputusan pada semua tingkatan, mengarusutamakan perspektif gender dalam semua kebijakan dan strategi pembangunan, serta mengeliminir, bahkan penghapusan semua bentuk kekerasan fisik dan non fisik dan diskriminasi perlakuan; mengembangkan kebijakan, cara-cara dan sarana untuk meningkatkan akses masyarakat adat/penduduk asli dan komunitas mereka terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi, dengan

memperhatikan hakekat ketergantungan mereka selama ini pada ekosistem alami; menyediakan pelayanan kesehatan dasar untuk semua kelompok masyarakat dan mengurangi ancaman terhadap kesehatan yang berasal dari lingkungan; membangun prasarana dasar kawasan wisata Kintamani, diversifikasi ekonomi dan perbaikan transportasi, serta akses pada pasar, kemudahan informasi pasar dan kredit bagi masyarakat miskin kawasan wisata Kintamani, untuk mendukung pembangunan secara berkelanjutan; melaksanakan alih pengetahuan dan teknik dasar pertanian berkelanjutan, pariwisata, termasuk pengelolaan sumber daya alam secara lestari, untuk petani dan nelayan skala kecil dan menengah, serta masyarakat miskin kawasan wisata Kintamani, melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait; meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan, dengan memajukan pola kemitraan produksi pangan berbasis *tat twam asi*; meningkatkan akses pada sanitasi untuk memperbaiki kesehatan masyarakat miskin kawasan wisata Kintamani dan akses pendidikan dalam bingkai kearifan nilai-nilai lokal *tat twam asi*.

Penutup

Kintamani sebagai destinasi wisata provinsi Bali dan dunia, tentu sangat menjanjikan untuk mensejahterakan masyarakatnya sebagai “pemilik” kawasan. Apalagi setiap tahunnya jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat rerata 11% pada lima tahun terakhir, yang semestinya berdampak pada peningkatan pendapatan sebagai efek

ikutannya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya bahwa masyarakat di kawasan wisata Kintamani tetap miskin, mencapai angka 6,80% di atas angka kemiskinan rata-rata Provinsi Bali. Pemerintah daerah baik tingkat kabupaten dan pemerintah provinsi secara struktural sudah berusaha mengentaskan kemiskinan dengan berbagai program, seperti gerbang gita shanti, gerbangdesigot, bedah rumah, bantuan langsung tunai (BLT), raskin dan gerbangsadu. Namun, realitanya masyarakat tersebut belum mampu melepaskan diri dari balutan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena adanya nilai-nilai cultural yang menyebabkan mereka sulit terentaskan dari kemiskinan, seperti kebiasaan meminta-minta atau mengemis, sifat malas, pesimis, mudah menyerah, kurang memiliki motivasi, dan pasrah menerima takdir, keadaan keluarga yang memang dari mulanya sudah miskin secara turun-menurun. Potensi kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat desa penyangga pembangunan pariwisata di kawasan Kintamani pada dasarnya bersandar pada keindahan alam dan modalitas sosial budaya masyarakat. Untuk kepentingan tersebut, masih terdapat beberapa hal yang mesti dilakukan oleh pemerintah setempat untuk menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata dunia. Berdasarkan kebutuhan wisatawan dan kemampuan masyarakat pedagang acung, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu memberikan pembinaan tentang pariwisata, memberikan pelatihan bahasa asing dan teknik menjelaskan objek serta produk dalam bahasa asing, dan menciptakan produk ciri khas objek wisata Kintamani sebagai

souvenir. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata Kintamani sebagai destinasi wisata sangat memungkinkan, sehingga tinggal menggali dan membangun jalinan tematikal kewenangan dan hak antar komponen, terutama desa adat sebagai simbolisme kelembagaan di kalangan masyarakat, serta para pelaku industri pariwisata dan pemerintah. Model pengentasan kemiskinan yang dibangun di kawasan wisata ini, adalah memfungsionalisasikan lembaga-lembaga sosial budaya (adat), pemerintah dan pelaku wisata berbasis nilai-nilai *Tat twam asi*. Mereka dilibatkan secara bersama-sama atau kolaboratif untuk mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan kultural seperti mengemis, malas, mudah menyerah pada nasib, dan kurang memiliki etos kerja, bisa diminimalisir jika semua menyadari, berempati, memiliki solidaritas, merasakan apa yang tengah dirasakan oleh orang lain (masyarakat miskin), dan mengakui sebagai suatu kesatuan, bahwa kau adalah aku dan aku adalah engkau. Dalam artian jika engkau miskin, maka aku juga miskin. Oleh karena itu, perlu kemiskinan kultural itu dientaskan dengan melibatkan semua komponen yang disesuaikan dengan keberadaan tugas dan fungsi dari masing-masing institusi/pranata, *paras paros, salunglung sabayantaka*, saling asih, saling asah, dan saling asuh. Implikasinya semua komponen harus terlibat langsung dalam pengentasan kemiskinan sebagai suatu kesatuan entitas, dengan menerapkan model pengentasan kemiskinan berbasis nilai-nilai *tat twam asi*. Pengentasan kemiskinan yang dilakukan secara

kolektif dan berkelanjutan niscaya kemiskinan akan dapat diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

Akker, J. Van den. 1999. *Principles and Method of Development Research*. London. Dalam Van Den Akker, J., Branch, R.M., Gustafson, K., Nieveen, N., & Plomp, T. (Ed.). *Design Approaches And Tools In Educational And Training*. Dordrecht: Kluwer Academic Publisher.

Arganta, Komang. 2009. “Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Petani di Kabupaten Bangli”. *Laporan Penelitian*. Denpasar: Lembaga Penelitian UNUD.

Bappeda Kabupaten Bangli. 2011. *Peta Permasalahan Kemiskinan Masyarakat Kabupaten Bangli*. Bangli: Bappeda Kabupaten Bangli.

Erawan, Wayan. 2010. “Menakar Kesulitan Ekonomi dan Keterikatan Budaya Masyarakat Pegunungan Batur Kintamani, Bangli”. *Laporan Penelitian*. Denpasar: Lembaga Penelitian UNUD.

Dinas Pariwisata Provinsi Bali. 2015. “Data Kunjungan Wisatawan ke Pulau Bali”. Denpasar.

Duija, I Nengah. 2006. “Tradisi Lisan dalam konteks masa kini: karakteristik sosio cultural dibalik mitos I Ratu Ayu Mas Membah. *Makalah*. Denpasar: Program Pascasarjana IHDN.

Hastuti, dkk. 2013 “Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis

Kearifan Lokal Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Lereng Merapi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Laporan Penelitian*. Yogyakarta: FIS UNY.

Hardiman, 2003. “Tradisi Lisan Dalam Konteks Masa Kini: Karakteristik Sosial-Kultural Dibalik Mitos I Ratu Ayu Mas Membah “ dalam <http://www.scribd.com/doc/36745557/Tradisi-Lisan-Dalam-Konteks-Masa-Kini-Karakteristik-Sosial-Kultural-Dibalik-Mitos#Scribd>. Diakses 15-2-2015.

Hendra, Novayana. 2013. “My World Tat Twam Asi” dalam <http://worlddehendra.blogspot.co.id/2013/11/at-twam-asi.html>. Diunduh tanggal 10 Februari 2015.

Inten, Gede. 2010. Pergeseran Nilai Sosial-Ekonomi Masyarakat Pedesaan Di Kawasan Wisata Gunung Batur Kintamani (Studi Etnografi Terhadap Masyarakat Penunjang Pariwisata di Kawasan Kintamani – Bali). *Laporan Penelitian*. Singaraja: Lembaga Penelitian Undiksha.

Lasmawan, Wayan. 2008. Pergeseran Nilai Sosial-Ekonomi Masyarakat Kawasan Penunjang Wisata Alam Gunung Batur – Kintamani (*laporan penelitian*). Singaraja: Lembaga Penelitian Undiksha.

Lasmawan, Wayan. 2009a. Studi Analisis Faktor-Faktor Penyebab Utama Kemiskinan Pada Masyarakat Pedesaan. *Laporan penelitian*. Bappeda Kabupaten Bangli.

Lasmawan, W. 2009b. Program Pengentasan Masyarakat Miskin dan Penguatan Kelembagaan Lokal Di Kabupaten Bangli – Bali. *Laporan Sibermas*. Singaraja: Lembaga Pengabdian Masyarakat Undiksha.

Lewis, Oscar.1966. *The Culture of Poverty*. California: W.H. Freeman & Co.

Nieveen, N. 1999. “*Prototype To Reserach Product Quality*”. Dalam. Van Den Akker, J., Branch, R.M., Gustafson, K., Nieveen, N., & Plomp, T. (Penyunting.). “Design Approaches And Tools In Educational And Training”. Dordrecht: Kluwer Academic Publisher.

Pemerintah Provinsi Bali. “Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.”

Plomp. 2007. “Educational Design Research: An Introduction” dalam *An Introduction to Educational Design Research*. Enschede, Netherland: National Institute for Curriculum Development.

Rahmatullah. 2013. “Budaya Kemiskinan dan Kemiskinan Struktural” 24 Agustus [http://www.rahmatullah.net/2013/08/kebudayaankemiskinan-](http://www.rahmatullah.net/2013/08/kebudayaankemiskinan-dan-kemiskinan.html) dan-kemiskinan.html (Diakses 10 Februari 2015).

Remi, Subyatie Soemitro dan Priyono Tjiptoherijanto. 2002. *Kemiskinan dan*

Kemerataan di Indonesia, Penerbit Reneka Cipta, Jakarta.

Suardika, Made. 2009. “Strategi dan Tantangan dalam Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) sebagai Kelembagaan Ekonomi di Pedesaan di Desa-desa Penyangga Industri Pariwisata Kintamani. *Laporan Penelitian*. Singaraja: Universitas Panji Sakti.

Sudjarwo dan Basrowi. 2009. *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju.

World Bank, *World Development Report 2008: Making Service Work for Poor People*, IBRD/ The World Bank, Washington DC